### BAB VI

### **PENUTUP**

# 6.1 Kesimpulan

Dari tahapan-tahapan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua pada tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa :

### 1. Perencanaan

Perencanaan RKAS SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua tahun 2019-2021 disusun oleh tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Draft RKAS yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan komite sekolah disosialisasikan.

2. Pelaksanaan Dana BOS SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua tahun 2019-2021 diawali dengan penyaluran Dana BOS SMK. Dana BOS diterima secara bertahap yakni tiga tahap. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada tahun 2020-2021 tidak berjalan dengan baik karena sering terjadinya keterlambatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah.

## 3. Pelaporan

Pelaporan Dana BOS SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua tahun 209-2021 kepada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK pada setiap akhir periode Dana BOS SMK. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana Bantuan Opersasional Sekolah SMK adalah, Dinas Pendidikan

Provinsi. Laporan untuk provinsi berupa email, laporan ringkas serta disertakan bukti laporan lengkap lengkap saat melakukan pelaporan langsung di dinas pendidikan provinsi. Sekolah juga melakukan publikasi berupa penjelasan pada sosialisasi saat rapat dengan komite sekolah dan wali kelas.

### 4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK kesehatan Yayasan Cartintes Atambua tahun 2019-2021 dilaksanakan oleh pihak intern dan ektern. Pengawasan intern oleh komite sekolah mengenai ketepatan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, yang kemudian telah disimpulkan maka peneliti perlu memberikan saran kepada:

- Sekolah diharapkan agar melakukan publikasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK dengan pemasangan papan pengumuman yang ditandatangani kepala Sekolah.
- Adanya pembagian/ pemisahan tugas antara Bendahara Dana Bantuan
   Operasional Sekolah dan bendahara sekolah agar tidak terjadi ketimbangan dalam pelaksanaan Tugas.
- Kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru-guru sebaiknya berkordinasi dengan baik, supaya pembuatan laporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu
- 4. Komite sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat,

- namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang dibuat oleh sekolah..
- 5. Pihak Pemerintah Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK agar pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat berjalan dengan baik.

\

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*<a href="http://bos.kemendikbud.go.id/home/about">http://bos.kemendikbud.go.id/home/about</a>, diakses tanggal 16 November 2021.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Pendidikan. Jakarta. Erlangga
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Lumis, Alisar Muhamad. 2017. Analisis Pengelolaan Dana Bos di SMA Darul Hadits Hubabaringan Kecamatan Siabu. Kabuupaten Mandaling Natal.
- M. Manullang. 2008. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta. Gajah Mada.
- Mahmudi. 2011. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga, Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Undang-uundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Suharsimi Arikonto. 2018. Evaluasi Program Pendidikan. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sirait, Sarida. 2017. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Bina Guuna.
- Solikhatun, Ismi. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. R&D. Bandung. Alfabeta.